

PEMANFAATAN MEDIA MASSA DALAM KONFLIK PKI DAN HMI: PROPAGANDA PEMBUBARAN HMI PADA TAHUN 1965

Putri Yasmin Azzahra^a, Imas Emalia^b

putriyasminazzahra2016@gmail.com, imas.emalia@uinjkt.ac.id

^{a b} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 1st July 2026

Revised: 31th July 2026

Accepted: 12th August 2026

Published: 13th August 2026

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v7i1.403>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemanfaatan media massa sebagai alat propaganda dalam konflik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 1965, khususnya terkait kampanye pembubaran HMI di akhir masa Orde Lama. Menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini mengkaji 13 artikel surat kabar dari 6 penerbit berbeda, terutama *Harian Rakjat* sebagai corong resmi PKI, serta dokumen-dokumen sezaman seperti pidato Soekarno, AD/ART HMI, dan Keputusan Presiden. Dengan kerangka teori propaganda Harold Lasswell, penelitian ini menemukan bahwa PKI secara sistematis melakukan manajemen simbol melalui pelabelan negatif terhadap HMI sebagai "onderbouw Masyumi", "kontra-revolusioner", "teroris", dan "setan perguruan tinggi" untuk menciptakan justifikasi publik bagi tuntutan pembubaran. Propaganda ini disebarluaskan secara masif melalui media massa afiliasi PKI untuk menstandarisasi opini publik dan memobilisasi reaksi massa yang direkayasa. Namun, upaya propaganda ini gagal total setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) yang mengubah secara drastis peta kekuasaan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa propaganda tanpa ditopang oleh dukungan kekuasaan yang kokoh dan kesesuaian dengan fakta sejarah akan menemui kegagalan ketika realitas itu sendiri bangkit melawan propaganda tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian sejarah politik Indonesia dengan mengalihkan fokus analisis dari lobi elite politik ke pertarungan hegemoni wacana di ruang publik yang dimediasi oleh pers sezaman.

KATA KUNCI

Propaganda Politik, HMI, PKI, Media Massa, Demokrasi Terpimpin

ABSTRACT

*This study analyzes the utilization of mass media as a propaganda tool in the conflict between the Indonesian Communist Party (PKI) and the Islamic Students' Association (HMI) in 1965, particularly concerning the campaign to dissolve HMI at the end of the Old Order era. Using historical research methods encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study examines 13 newspaper articles from 6 different publishers, especially *Harian Rakjat* as the official mouthpiece of PKI, along with contemporary documents such as Sukarno's speeches, HMI's constitution, and Presidential Decrees. Employing Harold Lasswell's propaganda theory framework, this study finds that PKI systematically conducted symbol management through negative labeling of HMI as a "onderbouw of Masyumi", "counter-revolutionary", "terrorist", and "university devil" to create public justification for dissolution demands. This propaganda was massively disseminated through PKI-affiliated mass media to standardize public opinion and mobilize engineered mass reactions. However, these propaganda efforts completely failed after the September 30th Movement (G30S/PKI) event that drastically altered the political power structure. This study concludes that propaganda without strong power support and alignment with historical facts will inevitably fail when reality itself rises against that propaganda. This research offers a new contribution to the study of Indonesian political history by shifting the analytical focus from elite political lobbying to the struggle for discursive hegemony in the public sphere mediated by contemporary press.*

KATA KUNCI

Political Propaganda, HMI, PKI, Mass Media, Guided Democracy

PENDAHULUAN

“HMI Setan Perguruan Tinggi,” sebuah *headline* koran *Harian Rakyat* edisi 1 Oktober 1965,¹ menggambarkan hubungan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berkembang menjadi salah satu konflik sengit dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Persaingan ini tidak hanya terjadi dalam debat ideologis semata, tetapi juga mengerahkan propaganda media, mobilisasi massa hingga tuntutan politik untuk membubarkan HMI. Dalam perkembangan Konflik tersebut, media massa khususnya surat kabar memiliki posisi penting karena menjadi salah satu ruang utama bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan gagasan, membentuk persepsi, dan memperoleh dukungan publik.

Pada tahun 1965, surat kabar secara umum berafiliasi ke kelompok tertentu sehingga berbagai Surat Kabar dapat menggalang afiliasi dengan partai partai baik secara terang-terangan atau tersirat melalui editorial mereka. Hal itu kemudian diformalkan melalui Keputusan Menteri Penerangan (no.29/SK/M/65) tertanggal 26 Maret 1965 tentang “Norma-Norma Dasar untuk Badan Usaha Pers dalam rangka meningkatkan Pers Indonesia”². Kondisi tersebut menjadikan pers tidak lagi bersikap netral dalam pemberitaan. Dalam konteks propaganda pembubaran HMI oleh PKI, keberadaan media massa yang memiliki afiliasi sangatlah penting untuk menyebarkan pemberitaan yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Dalam surat kabar yang berafiliasi dengan PKI, HMI dilabeli sebagai organisasi yang menentang manifesto politik undang-undang dasar 1945, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia atau biasa disebut dengan MANIPOL USDEK dan juga Nasionalisme, Agama dan Komunis (NASAKOM). HMI juga mendapat tuduhan sebagai *onderbouw* partai Masyumi, antek-antek Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) dan Manifesto Kebudayaan (MANIKEBU). Pelabelan-pelabelan tersebut kemudian membentuk citra politik HMI sebagai pihak yang dianggap bersebrangan dengan arah revolusi

Mekanisme pelabelan ini secara menjelaskan bagaimana PKI, sebagai kelompok dominan yang mengendalikan media dan memiliki pengaruh politik pada masa Demokrasi Terpimpin, secara sistematis mengonstruksi citra HMI sebagai “outsider” atau musuh revolusi. Label-label negatif yang disebarluaskan melalui media afiliasi PKI seperti *Harian Rakjat* dirancang untuk menciptakan justifikasi publik atas tuntutan pembubaran HMI dengan cara mengasingkan organisasi tersebut dari narasi besar revolusi nasional³. Dengan kata lain, pelabelan yang diberikan kepada HMI memang secara sengaja diarahkan untuk membangun penerimaan gagasan bahwa HMI patut dibubarkan. Ditengah kondisi tersebut, HMI menegaskan dirinya sebagai organisasi

¹ “HMI Setan Perguruan,” *Harian Rakjat* (Jakarta), Oktober 1965.

² David T. Hill, *Pers Di Masa Orde Baru* (The Press In New Order Indonesia, 2011; 1st ed., Jakarta: Yayasan ustaka Obor, 2011), 26.

³ Howard Saul Becker, *Outsiders* (New York: Free Press, 1997), 177-206.

mahasiswa yang independen yang orientasinya fokus kepada keislaman dan keindonesiaan serta mengajak semua golongan untuk tidak bekerjasama dengan PKI.⁴

Meningkatnya tuntutan pembubaran HMI tidak dapat dipisahkan dari politik Nasional setelah keluarnya Dekrit Presiden Juli 1959 yang memperkuat Demokrasi Terpimpin dan memperluas ruang politik bagi PKI. Dalam situasi ini HMI dianggap sebagai kekuatan yang akan menghambat agenda politik PKI sebagai kekuatan mahasiswa Islam.⁵ Perubahan politik tersebut kemudian memunculkan berbagai tekanan terhadap HMI pada tahun. Berbagai pidato, laporan media, dan pernyataan organisasi menunjukkan upaya sistematis untuk membangun citra HMI sebagai musuh revolusi. Pidato Presiden Sukarno di hadapan CGMI pada 29 September 1965⁶ misalnya, menekankan pentingnya perjuangan melawan imperialisme dan penyatuan kekuatan revolusioner, konteks politik yang kemudian dieksploitasi oleh organisasi pendukung PKI untuk memperkuat tuntutan pembubaran HMI. Di satu sisi, organisasi HMI sejak pertama kali didirikan merupakan organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas hubungan antara HMI dan PKI dari perspektif konflik politik, perjuangan organisasi, dan respons HMI terhadap tekanan PKI. Ferdiawan⁷ dan Bahri⁸ memusatkan perhatian pada manuver lobi HMI kepada Presiden Soekarno di tengah ancaman pembubaran pada 1965. Al Ayyubi dkk.⁹ memilih titik berangkat yang berbeda, yakni perlawanan HMI pasca-Gerakan 30 September. Adapun kajian sejarah HMI secara umum lebih banyak berkutat pada perkembangan organisasi, figur-figur berpengaruh, atau dinamika internalnya, sedangkan narasi pembubaran HMI melalui media masa surat kabar dari sudut pandang sejarah masih belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengalihkan fokus analisis dari "lobi elite politik" dan "aksi perlawanan fisik" kepada "wacana dan propaganda media". Berbeda dengan Ferdiawan & Bahri yang menekankan jaringan elite dan Al Ayyubi yang menekankan aksi massa pasca-peristiwa, penelitian ini secara spesifik membedah bagaimana Partai Komunis Indonesia (PKI) memanfaatkan media massa terutama *Harian Rakjat* sebagai alat

⁴ Agussalim Sitompul, *Menyatu Dengan Umat, Menyatu Dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman Keindonesiaan HMI, 1947-1997* (Jakarta: Kerjasama PT. Logos Wacana Ilmu dengan Lembaga Indonesia Adidaya, 2002), 108.

⁵ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975* (Jakarta: CV Misaka Galiza, 1976), 37-42.

⁶ Soekarno, *Pidato Soekarno Pada Amanat PJM Presiden Sukarno Pada Rapat CGMI Di Istora, Senajan* (Djakarta: ANRI, 1965).

⁷ Wiwid Ferdiawan and others, "Tinjauan Historis Upaya Lobby Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepada Presiden Soekarno Tentang Pembubaran PKI Pada Tahun 1965" (PhD Thesis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2015).

⁸ Samsul Bahri, *Bulan Bintang Hijau Hitam: Sejarah HMI Di Kota Medan (1952-1998)* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025).

⁹ Shalahuddin Al Ayyubi et al., "Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) Pada Pasca Peristiwa Gestapu 1966," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 417-40.

propaganda sistematis untuk menciptakan opini publik yang mendukung pembubaran HMI pada akhir masa Orde Lama. Dengan menggunakan teori Propaganda Harold Lasswell, penelitian ini menganalisis manajemen simbol, standarisasi pikiran publik, serta mobilisasi reaksi massa yang direayasa melalui pemberitaan dan demonstrasi. Pendekatan ini membuka perspektif baru bahwa konflik HMI-PKI bukan hanya pergulatan politik di tingkat elit, melainkan juga sebuah pertarungan hegemoni wacana di ruang publik yang dimediasi oleh pers sezaman

Penelitian ini mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana propaganda pembubaran HMI serta bagaimana respon HMI berkaitan dengan peristiwa di akhir Orde Lama, khususnya tahun 1965 tersebut. Untuk menjawabnya, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber primer, seperti arsip surat kabar sezaman, pidato Soekarno, dokumen internal HMI, dan dokumen resmi pemerintah. Pilihan sumber ini bukan sekadar kelengkapan metodologis, dari persilangan berbagai sumber itulah terlihat bahwa isu pembubaran HMI sesungguhnya merupakan arena perebutan wacana yang melibatkan negara, partai politik, media massa, dan organisasi mahasiswa secara bersamaan. Dengan cara pandang demikian, penelitian ini berharap membuka perspektif lain dalam membaca konflik HMI-PKI, sekaligus menambah kedalaman kajian sejarah politik Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin.

Keterbatasan studi ini terletak pada minimnya artikel pada surat kabar yang mendukung HMI dikarenakan ditutupnya 21 kantor surat kabar atas tuduhan pendukung BPS. Hal ini mengakibatkan penulis kesulitan mencari arsip surat kabar yang kontra terhadap PKI

METODE

Penelitian ini merupakan kajian sejarah yang menggunakan 4 tahapan metode dalam penelitian sejarah. Tahapannya, yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi.¹⁰ Pada tahap heuristik, penulis mencari berbagai surat kabar terbitan tahun 1960-an, dengan total 13 Artikel Surat Kabar dari 6 penerbit berbeda, yaitu 9 Artikel dari *Harian Rakjat*¹¹, masing-masing satu artikel dari *Berita Yudha*¹²,

¹⁰ M. Dien Madjid, *Metode Sejarah: Teori Dan Praktek* (Kencana, 2021).

¹¹ "28 Ormas Tuntut HMI Dibubarkan," *Harian Rakjat* (Jakarta), September 29, 1965; "Dalam Aksi Aksi Membubarkan HMI WPM Subandrio Hargai Militansi Mahasiswa," *Harian Rakjat* (Jakarta), March 24, 1965; "Editorial: Teror HMI," *Harian Rakjat* (Jakarta), March 9, 1965; "Gerombolan HMI Meneror," *Harian Rakjat* (Jakarta), March 9, 1965; "Harusnya Tidak Ada Plinat-Plinut Terhadap HMI," *Harian Suluh Indonesia* (Jakarta), March 12, 1965; *Harian Rakjat*, "HMI Setan Perguruan"; "HMI Sudah Terang Terangan Bertindak Kontra-Revolusioner," *Harian Rakjat* (Jakarta), March 15, 1965; "Teror HMI Tak Dapat Ditolerir 12 Organisasi Pemuda Dan Mahasiswa Menuntut HMI Dibubarkan, Teroris-Terorisnya Ditangkap Dan Dihukum," *Harian Rakjat* (Jakarta), March 10, 1965; HR, "WPM Subandro Didepan 10.000 Demontran: Kalau HMI Dibubarkan... Karna Salah HMI Sendiri.," *Harian Rakjat* (Jakarta), March 15, 1965.

¹² "Presiden Punja Kader Kader Terpertjaja," *Berita Yudha* (Jakarta), Oktober 1965.

*Harian Suluh Indonesia*¹³, *Kedaulatan Rakjat*¹⁴, dan *Kompas*¹⁵. Semua surat kabar diperoleh dari koleksi arsip Perpustakaan Nasional. Kemudian transkrip pidato Soekarno, yakni Pidato Soekarno pada Amanat PJM Presiden Sukarno pada Rapat CGMI di Istora, Senajan¹⁶. Lalu, dokumen internal AD/ART HMI¹⁷, dokumen Keputusan Presiden (Keppres) No. 200 Tahun 1960¹⁸, Keppres No.98 Tahun 1964¹⁹, Keppres no.240 Tahun 1964²⁰ dan buku-buku sezaman dengan judul *Menyatu dengan umat, menyatu dengan bangsa: pemikiran keislaman keindonesiaan HMI, 1947-1997*, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*. Pencarian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait rumusan masalah yang ditanyakan. Pencarian sumber dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan nasional dan melakukan pencarian daring. Lalu untuk kritik sumber, penulis memastikan keaslian sumber dengan melihat metadata yang diambil dari sumber tersebut (Perpustakaan Nasional), seperti tahun terbit, nama penulis sumber terkait, penerbit dan pemilik sumber. Masuk ke tahap interpretasi, penulis memaknai dan menafsirkan ulang setiap sumber yang telah didapatkan dan melakukan konfirmasi dari berbagai sumber sejarah yang relevan.²¹ Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi, yaitu penulisan ulang. Dalam tahapan terakhir inilah kemampuan sejarawan menjadi penentu sejarah ditulis.

Teori Propaganda dari Harold Lasswell digunakan dalam penelitian ini, karena mengkaji pada pengendalian opini publik. Teori Propaganda Harold Lasswell dalam bukunya *Propaganda Technique in the Word War* berfokus pada pengendalian opini publik melalui manipulasi symbol-simbol sosial. Jika di masa lalu orang-orang melakukan propaganda melalui tarian perang, tetapi dalam masyarakat modern propaganda diciptakan melalui penyebaran kata-kata dan media cetak.²² Penerapan teori ini pada media massa Surat kabar berokus pada upaya menstandarisasi pikiran warga sipil melalui ide-ide yang secara berulang sengaja diciptakan. Media massa surat kabar juga akan menonjolkan ide menguntungkan dan menetralkan ide yang tidak menguntungkan. Hal itu dilakukan untuk memancing tuntutan publik yang sebenarnya sudah direncanakan di awal, agar seolah olah berasal dari publik.

¹³ *Harian Suluh Indonesia*, "Harusnya Tidak Ada Plinat-Plinut Terhadap HMI."

¹⁴ "HMI Setan Kota," *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta), Mei 1965.

¹⁵ Kompas, "KOTRAR Bereskan dan Bina HMI," *Kompas* (Jakarta), September 18, 1965; Kompas, "Masalah HMI," *Kompas* (Jakarta), September 20, 1965; Kompas, "Soal HMI Segera Diumumkan oleh KOTRAR," *Kompas* (Jakarta), September 6, 1965; Kompas, "Tidak Hanya HMI," *Kompas* (Jakarta), September 16, 1965.

¹⁶ Soekarno, *Pidato Soekarno Pada Amanat PJM Presiden Sukarno Pada Rapat CGMI Di Istora, Senajan*.

¹⁷ PB HMI, "Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2026," Pontianak: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2026, 24 November - 11 Desember 2023.

¹⁸ "Keputusan Presiden (Keppres) No. 200 Tahun 1960," Keputusan Presiden (Keppres), Pemerintah Pusat, Agustus 1960, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/150794/keppres-no-200-tahun-1960>.

¹⁹ "Keppres No.98 Tahun 1964," 1964.

²⁰ "Keppres No.240 Tahun 1964," 1964.

²¹ Faizal Arifin, *Metode Sejarah: Merencanakan Dan Menulis Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2023).

²² Harold Lasswell, *Propaganda Technique In the World War* (New York: Ravenio Books, 1938), 1-12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Antara PKI dengan HMI

Konflik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada sekitar tahun 1960-an tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi pertentangan ideologis yang berkembang sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang didirikan pada 5 Februari 1947, HMI sejak awal berdirinya telah menempatkan Islam sebagai asas organisasi hingga saat ini.²³ Di lain sisi, PKI menjadikan Marxisme-Leninisme sebagai landasan ideologi perjuangannya yang berpijak pada materialisme historis dan perjuangan kelas. Perbedaan mendasar tersebut melahirkan dua pandangan berbeda terhadap Negara, agama dan arah tujuan Indonesia.²⁴

HMI tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dan pedoman spiritual,²⁵ tetapi sebagai dasar moral berkehidupan, sebagaimana terumuskan kedalam tujuan organisasi tersebut, "*Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhai Allah Subhanahu Wata'ala*".²⁶ Sedangkan menurut pandangan Marxis-Leninis, agama diposisikan sebagai produk dari hubungan sosial yang pada akhirnya akan kehilangan fungsinya setelah masyarakat tanpa kelas tercapai. Pandangan ini telah menyebabkan tokoh-tokoh Islam memandang komunisme sebagai ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Komunisme sendiri memandang agama sebagai penghalang bagi sosialisme dan harus dihilangkan.²⁷

Pertentangan tersebut semakin memanas ketika PKI berkembang menjadi salah satu kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Di bawah kepemimpinan D.N Aidit, PKI berhasil memperluas pengaruhnya ke berbagai organisasi massa, salah satunya melalui Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Ekspansi pengaruh tersebut tidak berhenti pada tataran organisasi massa, melainkan juga menjangkau sektor pendidikan melalui strategi yang lebih terstruktur. Untuk memperkuat posisinya di ranah pendidikan, PKI menerapkan tiga skema utama, yaitu mengendalikan lembaga-lembaga pemerintah yang ada, melemahkan organisasi-organisasi yang dianggap sebagai ancaman atau oposisi, serta menciptakan lembaga-lembaga baru sebagai wadah alternatif bagi konstituennya.

²³ PB HMI, "Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2026," 62.

²⁴ Sitompul, *Menyatu Dengan Umat, Menyatu Dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman Keindonesiaan HMI, 1947-1997*, 65-66.

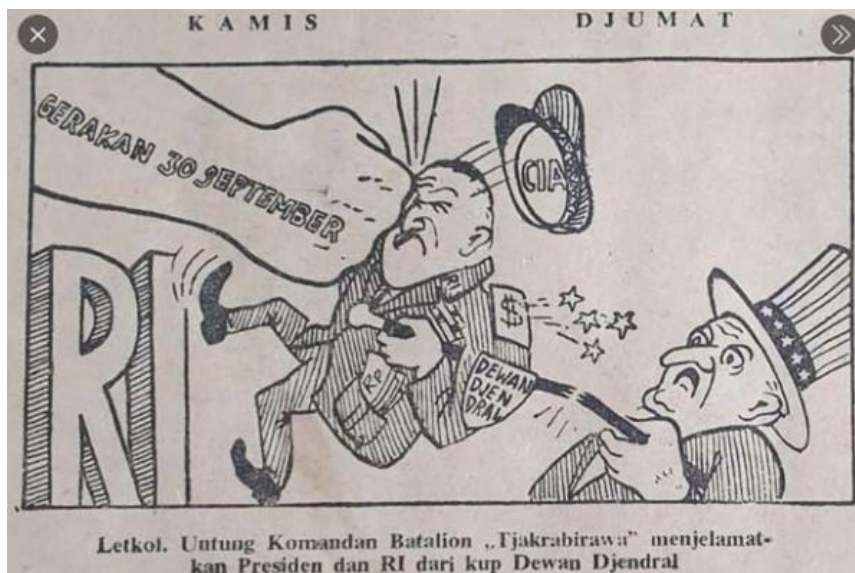
²⁵ Asep Achmad Hidayat, Usman Supendi, and Dandie Hambalana, "Sejarah Gerakan Sosial, Politik dan Agama di Kota Tasikmalaya pada Tahun 1901-1940," *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 6, no. 1 (Agustus 2025): 147.

²⁶ PB HMI, "Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2026," 63.

²⁷ M. Rasyidi, *Islam Menentang Komunisme* (Jakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1965), 22.

Pada skema pertama, PKI berhasil menempatkan Profesor Prijono sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1957²⁸. Namun, upaya untuk menguasai penuh kementerian tersebut mendapat perlawanan sengit dari koalisi nasionalis, kelompok Islam, dan militer. Sebagai bentuk pembatasan, pada tahun 1961 pemerintah membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) yang dipimpin oleh tokoh yang didukung militer, Dr. Sjarief Thajeb. Kegagalan relatif untuk menguasai sektor eksekutif tersebut membuat PKI menggencarkan skema kedua: melemahkan kelompok oposisi, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Di sinilah PKI secara langsung berbenturan dengan HMI. CGMI, sebagai organ sayap kiri PKI, secara agresif melancarkan serangan propaganda dengan menuduh HMI sebagai antek imperialisme asing dan penentang Manipol/Usdek. Namun, HMI menolak keras tuduhan tersebut dan secara konsisten menegaskan independensinya sebagai organisasi mahasiswa yang berasaskan Islam. Penolakan HMI untuk tunduk pada tekanan ideologis dan politik PKI, ditambah dengan basis kadernya yang kuat di universitas-universitas, menjadikan HMI satu-satunya "organisasi yang tidak terkendali" yang masih berdiri di kalangan mahasiswa setelah pembubaran Masyumi. Kegagalan PKI untuk mengkooptasi atau menaklukkan HMI melalui skema pertama dan kedua inilah yang menciptakan kebencian timbal balik yang memuncak menjadi kampanye propaganda sistematis untuk membubarkan HMI sepanjang tahun 1965²⁹. Dengan begitu PKI tidak hanya bergerak sebagai partai politik, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik melalui organisasi dan media pers saat itu.

Gambar 1. Karikatur Dari Letkol Untung Sedang Menyelamatkan Presiden Soekarno Dengan Cara Menculik Angkatan Darat. Bukti keberpihakan *Harian Rakjat* kepada PKI.



(Sumber: *Harian Rakjat*, 2 Oktober 1965)

²⁸ Salah satu kader dalam Partai Murba dan Komite Perdamaian Indonesia. Profesor Prijono menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun 1957 dan 1966.

²⁹ R. M. Thomas, *A Chronicle of Indonesian Higher Education: The First Half Century, 1920-1970* (Chopmen, 1973), 373.

Harian Rakjat sebagai corong resmi PKI, menjadi ujung tombak penyebaran propaganda pembubaran HMI. Pemberitaan di media ini secara konsisten memuat pelabelan tentang tuntutan pembubaran HMI dari berbagai organisasi massa. Gambar 1 menunjukkan merupakan propaganda visual yang mendukung Gerakan 30 September (G30S) dengan Letkol Untung sebagai pahlawan dan menuduh jenderal sebagai antek imperialisme. Karikatur pada gambar 1 diatas menjelaskan situasi pemberontakan G30S/PKI dari sudut pandang PKI. Letkol Untung (yang diilustrasikan sebagai tangan yang sedang meninju) merupakan pahlawan revolusi dengan menumpas dewan jendral (sekelompok perwira tinggi TNI Angkatan Darat). Penggambaran dewan jendral yang terpukul dan terlepasnya topi CIA menarasikan perwira Tinggi AD yang telah gugur dan lepas dari pengaruh amerika. Sedangkan tongkat yang patah dari seorang yang memakai topi amerika merupakan penggambaran patahnya “setiran” dari Amerika.

Dalam konteks inilah HMI dipandang sebagai salah satu penghalang utama bagi perluasan PKI di kalangan mahasiswa. Basis perkaderan HMI yang berasal dari Universitas, jaringan organisasinya yang berkembang di berbagai wilayah serta identitasnya sebagai organisasi Islam independen membuat HMI sulit dipengaruhi oleh organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Terutama, setelah Masyumi resmi di bubarkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masyumi, Termasuk Bagian/Cabang, Ranting Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.³⁰

Berdasarkan pola propaganda yang berkembang dalam berbagai pemberitaan surat kabar *Harian Rakjat* dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, tampak adanya upaya sistematis untuk membangun citra HMI sebagai organisasi yang bertentangan dengan revolusi. PKI beralih kepada HMI yang dianggap sebagai front terakhir kekuatan mahasiswa Islam di lingkungan kampus sebagai pemilik dari calon sarjana dan pemimpin.³¹

Namun, penting untuk membedakan antara Konflik ideologis dan propaganda politik. Perbedaan ideologis (dalam hal ini NASAKOM) merupakan ciri umum politik Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin. Sejak awal tahun 1965, persaingan ini berubah menjadi kampanye politik sistematis untuk menggulingkan HMI. Pada tahap ini, PKI tidak lagi hanya mengkritik gagasan HMI sebagai organisasi Islam, tetapi juga mulai menggambarkan HMI sebagai organisasi yang menghambat revolusi, menentang Manipol-USDEK, *onderbouw* Masyumi, serta bersekutu dengan kelompok

³⁰ “Keputusan Presiden (Keppres) No. 200 Tahun 1960.”

Soekarno memiliki ambisi untuk segera membubarkan Partai Masyumi. Alasan yang paling kuat ialah karna Masyumi tertuduh sebagai partai yang melakukan pemberontakan, para pemimpinnya turut serta dan jelas terlibat dalam pemberontakan atau memberikan bantuan. Sedangkan Masyumi tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota - anggotanya itu. Soekarno menggambarkan pembubaran Partai Masyumi sebagai moral Revolusi. Lebih lanjut baca *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* / A. Syafii Maarif halaman 187-188.

³¹ Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, 38.

kontra-revolusioner. Pergeseran dari debat ideologis ke pelabelan politik ini membentuk dasar propaganda untuk membubarkan HMI sepanjang tahun 1960-an.

Pada 9 Maret 1965, sebanyak 12 organisasi pemuda dan mahasiswa (diantaranya GMNI, GMRI, IPPI, Pemuda Marhaenis, dan Pemuda Rakyat) menggelar pertemuan dengan pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan daftar tuntutan yang sangat rinci. Selain mendesak pembubaran HMI dan GM-SOS, mereka juga menyerahkan daftar "unsur-unsur BPS" yang harus dibubarkan, mencakup koran-koran seperti Pelopor, Mingguan Film, dan Warta Bogor, serta organisasi seperti Partai Murba, SOKSI, Gasbiindo, KBKI, dan PII. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar nama-nama seperti Adam Malik, BM Diah, dan Drs. Sunaryo dipecat dari jabatan publik dan dicabut hak mengajarnya.³² Tanggal 12 Maret 1965, Menko Ali Sastroamidjojo dalam ceramahnya di hadapan kader PPI secara tegas menyatakan tidak dapat menolerir perbuatan teror yang dilakukan HMI pada rapat umum PWI di Malang.³³

Gambar 2. *Headline* berita HMI kontra revolusioner



(Sumber: *Harian Rakjat* 15 Maret 1965)

Pada surat kabar *Harian Rakjat* edisi 15 Maret 1965 (gambar 2), HMI diberi label sebagai Kontra-revolusi. Kehadiran K.H. Masjkur (seorang tokoh Islam) yang disebutkan pada pemberitaan tersebut merupakan manuver politik yang cerdas. Hal ini dibuat untuk memberi kesan bahwa tidak hanya PKI, tetapi juga tokoh-tokoh Islam moderat turut menyetujui tindakan pembubaran terhadap HMI.

Strategi propaganda ini tidak hanya dilancarkan PKI didalam media massanya. Ketua, CC PKI, D.N Aidit dalam pidatonya di hadapan kursus Tavip PPI (organisasi di bawah pengaruh komunis) pada 10 Maret 1965, secara terang-terangan menyatakan:

³² 12 Organisasi Pemuda Dan Pelajardukung PWI, (Jakarta), March 10, 1965.

³³ *Harian Rakjat*, "Teror HMI Tak Dapat Ditolerir 12 Organisasi Pemuda Dan Mahasiswa Menuntut HMI Dibubarkan, Teroris-Terorisnya Ditangkap Dan Dihukum."

"Seharusnya tidak ada plintat-plintut terhadap HMI. Saya menyokong penuh tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang menuntut pembubaran HMI, yang seharusnya sudah lama bubar bersamaan dengan bubarnya Masyumi."³⁴

Di sisi lain, propagandis juga bergerak di level organisasi kemahasiswaan. Presidium PPMI (Persatuan Pemuda Mahasiswa Indonesia) mengeluarkan keputusan pada 16 Maret 1965 untuk memecat HMI dari keanggotaannya dan mendesak agar HMI segera dibubarkan.³⁵ Namun, Surat Kabar *Berita Yudha* kemudian memuat klarifikasi dari Cosmas Batubara selaku Wakil Ketua Presidium PPMI, yang menyatakan bahwa berita terkait kawat WPM Soebandrio³⁶ mengenai HMI tidak benar dan mereka tidak tahu menahu mengenai siaran pers tersebut, serta menyerukan kepada mahasiswa untuk menjaga persatuan dengan melaksanakan Kelimat Azimat Revolusi. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di internal PPMI sendiri.

Sikap Presiden Soekarno sendiri saat itu sangat menentukan dan memuat ambiguitas. Dalam pidatonya pada pembukaan Kongres Nasional ke-3 CGMI, 29 September 1965 (empat hari sebelum G30S), Bung Karno secara eksplisit berbicara tentang mahasiswa yang progresif revolusioner, nasionalis, agamis, dan komunis³⁷. Dalam pidato tersebut, ia mengingatkan bahwa jika ada mahasiswa yang tidak sejalan dengan jalannya revolusi, maka mereka akan disingkirkan. Namun demikian, ia juga menyatakan bahwa HMI masih memiliki "kader-kader yang terpercaya" di dalamnya, sebagaimana disampaikan oleh Menko Ruslan Abdulgani kepada pers pada 1 Oktober 1965.³⁸ Sikap Soekarno ini menunjukkan bahwa meskipun mendapat tekanan luar biasa dari PKI, beliau belum sepenuhnya mengambil keputusan final untuk membubarkan HMI, dan hal ini yang kemudian menjadi celah keselamatan bagi HMI.

Respon HMI terhadap Tuntutan Pembubaran

Langkah yang ambil HMI dalam menanggapi berbagai tuduhan tersebut adalah dengan menegaskan kembali jati diri yang tertuang didalam Anggaran Dasar (AD) HMI. Sebagai organisasi mahasiswa, HMI secara tegas memiliki sifat independen, sebagaimana tertuang pada pasal 5 AD/ART HMI: "HMI bersifat independen"³⁹ dan prinsip independensi tersebut terus dijaga sampai hari ini. Hal ini dilakukan untuk

³⁴ *Harian Suluh Indonesia*, "Harusnya Tidak Ada Plinat-Plintut Terhadap HMI."

³⁵ *Harian Rakjat*, "Dalam Aksi Aksi Membubarkan HMI WPM Subandrio Hargai Militansi Mahasiswa."

³⁶ Pemimpin Badan Pusat Intelejen Negara (BPI) 1959. Ia merupakan tokoh non militer pertama yang memegang kendali operasional intelejen. BPI melalui Soebandrio memiliki mekanisme pelaporan langsung kepada presiden.

³⁷ Soekarno, *Pidato Soekarno Pada Amanat PJM Presiden Sukarno Pada Rapat CGMI Di Istora, Senajan*.

³⁸ *Berita Yudha*, "Presiden Punja Kader Kader Terpertjaja."

³⁹ PB HMI, "Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2026," 62.

menepis tuduhan berafiliasinya HMI dengan partai manapun, termaksud Masyumi. Bantahan terhadap tuduhan itu tidak lepas dari konteks politis. Masyumi yang telah dibubarkan melalui Keppres No. 200 Tahun 1960⁴⁰ pada dasarnya telah kehilangan basis umat Islam setelah keluarnya NU.

Gambar 3. Presiden Soekarno punya kader terpercaya di HMI



Sumber: *Berita Yudha* 1 Oktober 1965

Di tengah tekanan tuntutan pembubaran, Menko Hubra (Mentri Koordinator Hubungan dengan Rakyat) Dr. Ruslan Abdulgani dalam pernyataannya kepada pers pada 1 Oktober 1965 (bertepatan dengan meletusnya G30S) menyatakan, "Kita akan bantu proses kristalisasi itu karena Presiden sendiri mempunyai kader-kadernya yang terpercaya di dalam tubuh HMI."⁴¹ Pernyataan itu menjadi sinyal positif bahwasanya pemerintah, setidaknya melalui Menko Ruslan, melihat nilai positif setelah peristiwa G30S/PKI dalam tubuh HMI yang berbeda jauh dari pemberitaan yang ada di *Surat Kabar Harian Rakjat* (gambar 3).

HMI sendiri menyoroti kelemahan mendasar dalam tubuh umat Islam Indonesia yang kerap melanggar ikrar dan perjanjian persatuan. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh pendiri HMI, Prof. Drs. Lafran Pane, pada penutupan Pameran Ilmiah & Karangan Bunga yang diadakan HMI, Corps HMI-wati (COHATI), Badan Koordinasi Lembaga-Lembaga (BAKOLA) Cabang Yogyakarta di Gedung Seni Sono, Yogyakarta, tanggal 20 April 1969. Meski pidato ini disampaikan pasca G30S, retorika tersebut mencerminkan akar permasalahan internal umat Islam yang menjadi salah

⁴⁰ "Keputusan Presiden (Keppres) No. 200 Tahun 1960."

⁴¹ *Berita Yudha*, "Presiden Punya Kader Kader Terpertjaja," 1.

satu penyebab HMI mudah diserang secara politis.⁴² Pernyataan yang diungkapkan terhadap umat Islam merupakan kritik pedas terhadap perpecahan umat yang tidak hanya terjadi di level partai politik, tetapi juga merambah ke organisasi pemuda, mahasiswa, dan guru. Sebagai contoh, di bidang mahasiswa, setelah HMI lahir, muncul pula Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) yang beraliansi dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Muslimin Indonesia (PMI) yang beraliansi dengan Nadhatul Ulama (NU), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Muhammadiyah), dan Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) yang beraliansi dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan semuanya membagi kekuatan umat Islam. HMI menggunakan argumen ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa disalahkan atas perpecahan dan konflik yang telah mengakar dalam tubuh umat Islam, serta bahwa mereka sendiri adalah korban dari polarisasi yang diciptakan oleh faktor internal dan eksternal.

Meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, Pengurus Besar (PB) HMI tetap melakukan komunikasi politik dan membangun hubungan baik termaksud kepada Angkatan Darat (AD). Upaya ini terlihat dari bagaimana respon pemerintah yang tidak langsung membubarkan HMI. Sebelum G30S terjadi, PB HMI secara aktif menyusun bantahan terhadap fitnah yang dilancarkan, terutama terkait tuduhan "teror HMI di Malang" yang menjadi alasan utama pengiriman Tim KOTRAR ke Jawa Timur.⁴³

Gambar 4. Rapat Umum menuntut pembubaran HMI



(Sumber: *Harian Rakjat* 15 Maret 1965)

⁴² Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, 36.

⁴³ Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, 39.

Gambar 4 menunjukkan lautan massa demonstran. Terdapat sebuah panggung atau mimbar di mana sejumlah tokoh sedang berdiri (salah satunya adalah Wakil Panglima Besar KOTRAR, Dr. Soebandrio). Di bagian depan panggung, terlihat jelas sebuah spanduk besar yang bertuliskan “KOMANDO TERTINGGI RETOOLING ALAT REVOLUSI” (KOTRAR), dipublikasikan pada *Harian Rakjat* 15 Maret 1965.

Untuk memahami mengapa KOTRAR menjadi lembaga sentral dalam kasus pembubaran HMI, perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang pembentukannya. KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 98 Tahun 1964 pada tanggal 27 April 1964, dengan tugas pokok memupuk, memelihara, dan mengusahakan agar alat-alat revolusi memperoleh hasil yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan revolusi.⁴⁴

Dalam Keppres No. 240 Tahun 1964 yang mengatur tugas dan organisasinya, disebutkan bahwa retooling berarti pembongkaran susunan peralatan yang tidak efisien dan pengantiannya dengan susunan baru ini adalah sebuah proses yang berjalan terus dan *overall*. KOTRAR dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sebagai Panglima Besar, dengan pimpinan sehari-hari dipegang oleh Wakil Panglima Besar yang berpangkat Menteri⁴⁵.

Gambar 5. HMI setan Perguruan Tinggi, merupakan label negative yang disematkan PKI untuk HMI



Sumber: *Harian Rakjat* 1 Oktober 1965

Dalam pemberitaan pada gambar 5, PPMI dan MMI menyatakan bahwa HMI merupakan "setan perguruan tinggi", sebuah pelabelan yang sangat provokatif. Dalam berita tersebut, Presidium MMI, Bambang Haryanto SH, menegaskan bahwa "tidak ada jalan lain bagi MMI selain untuk meneruskan aksinya sampai HMI dibubarkan". Pernyataan ini juga diiringi dengan pernyataan Presidium PPMI yang menyatakan, "Lelang dan rumput pahit harus dicabut." (Metafora yang merujuk pada HMI sebagai gulma/racun yang harus dimusnahkan dari perguruan tinggi)

Dengan runtuhnya kekuasaan PKI, seluruh propaganda yang selama ini dibangun runtuh. HMI, yang sebelumnya dituduh sebagai "setan kota", "setan perguruan tinggi" "antek CIA", dan "musuh revolusi", justru terbukti sebagai

⁴⁴ "Keppres No.98 Tahun 1964."

⁴⁵ "Keputusan Presiden (Keppres) No. 200 Tahun 1960."

organisasi yang memberantas komunis. Melalui Corps Mahasiswa yang dikomandoi oleh Letnan Jendral Achmad Tirta Sudiro (salah seorang anggota HMI), HMI turut ambil bagian aktif dalam memberantas pemberontakan di Madiun bersama ABRI.⁴⁶ Puncak dari respon dan pembelaan atas HMI terlihat pada tanggal 18 September 1965, ketika pemerintah melalui KOTRAR mengeluarkan keputusan untuk memberikan pembinaan kepada HMI, bukan pembubaran.⁴⁷ Dengan demikian, HMI berhasil selamat dari propaganda pembubaran yang dilancarkan PKI dan berhasil membuktikan dirinya adalah organisasi mahasiswa yang bersifat independen.

Analisis Propaganda Pembubaran HMI di Media Massa Kiri

Untuk memahami bagaimana propaganda pembubaran HMI yang dilancarkan PKI pada tahun 1960-an, kita dapat menggunakan kerangka teori propaganda yang dirumuskan oleh Harold Laswell. Dalam teorinya, Harold menjelaskan bahwa propaganda merupakan tehnik pengendalian opini melalui symbol symbol tertentu.⁴⁸ Artinya, alih-alih mengubah kondisi dikehidupan nyata, propaganda akan bekerja dengan cara menguak bagaimana cara pandang masyarakat terhadap suatu objek melalui opini, laporan atau julukan yang secara terus menerus disebarluaskan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai pengendali opini adalah PKI (who), yang memberikan pelabelan negative (say what) pada media massa yang berafiliasi dengan PKI (in which channel) sedangkan HMI adalah organisasi mahasiswa yang berusaha dirusak citranya (to who) dan menjadi musuh Negara sehingga harus dimusnahkan (with what effect).

Langkah awal propaganda PKI dalam melakukan manajemen symbol (penggunaan tanda atau citra tertentu secara sengaja) dengan cara mendiskreditkan HMI sebagai upaya mengubah persepsi masyarakat. PKI secara terus menerus dan sistematis menyematkan pelabelan negative seperti, "*onderbouw Masyumi*", "*antek Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS)*", "*kontra-revolusi*",⁵⁰ dan "*teroris*",⁵¹ dan bahkan "*Setan Kota*"⁵² didalam surat kabarnya. Surat kabar, dalam sejarah perjuangan merupakan sarana penyebar pengetahuan, penyebaran gagasan, alat perjuangan, serta propaganda politik.⁵³

⁴⁶ Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, 38.

⁴⁷ "KOTRAR Bereskan Dan Bina HMI," *Kompas* (Jakarta), September 15, 1965.

⁴⁸ Harold Lasswell, *Propaganda Technique In the World War*, 11.

⁴⁹ Harold Lasswell, *Propaganda Technique In the World War*, 11.

⁵⁰ *Harian Rakjat*, "HMI Sudah Terang Terangan Bertindak Kontra-Revolutioner."

⁵¹ *Harian Rakjat*, "Editorial: Teror HMI"; *Harian Rakjat*, "Gerombolan HMI Meneror," 1.

⁵² *Harian Rakjat*, "HMI Setan Perguruan," 1; *Kedaulatan Rakjat*, "HMI Setan Kota," 1.

⁵³ Luthfah Eta, Aini, and SitiMaimunah, "Islam Bergerak dan Pertarungan Gagasan: Analisi Redaksi Sebagai Respon Gerakan Misionaris dan Zending di Surakarta, 1917-1923 M," *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2025): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i01.255>.

Gambar 6. Salah satu pemberitaan tentang pengganyangan HMI



(Sumber: *Harian Rakjat* 22 September 1965)

Gambar 6 menunjukkan publikasi dari *Harian Rakjat* yang mengutip dua editorial dari surat kabar sekutunya, yaitu *Suluh Indonesia* dan *Bintang Timur*, yang sama-sama mengkritik keputusan pemerintah. *Suluh Indonesia* menyatakan bahwa keputusan yang berwajib (KOTRAR) mengenai HMI adalah “mengecewakan”. Sedangkan Editorial *Bintang Timur* Mengkritik keputusan KOTRAR yang tidak membubarkan HMI.

Setelah simbol simbol telah terbentuk (label negatif terhadap HMI), PKI secara konsisten dan masif menyebarkan berita-berita tersebut melalui media massanya. Lasswell menekankan, bahwa pikiran masyarakat dapat distandarisasi melalui berita, dan opini publik akan terbentuk melalui pengulangan ide yang sama secara disengaja. Selain *Harian Rakjat*, banyak Surat kabar ibu kota maupun daerah daerah yang memihak PKI, seperti *Suluh Indonesia*, *Harian Bintang Timur*, *Kedaulatan Rakjat Yogyakarta* dan lainnya. Jika ada berita yang menguntungkan HMI, mereka tidak mau menyiarkannya cepat-cepat atau bahkan tidak mau menyiarkannya sama sekali⁵⁴. Judul-judul provokatif dan pengulangan informasi yang sama diberitakan hampir setiap hari, sehingga secara perlahan membentuk persepsi publik, bahwa HMI memang pantas dibubarkan⁵⁵.

⁵⁴ Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, 42.

⁵⁵ *Harian Rakjat*, “28 Ormas Tuntut HMI Dibubarkan,” 2.

Puncak dari strategi ini terjadi pada Sabtu, 13 Maret 1965, ketika sebanyak 10.000 pemuda dan mahasiswa menggelar demonstrasi di Jakarta. *Harian Rakjat* memberitakan aksi ini dengan gamblang, lengkap dengan yel-yel yang diteriakkan: "Ganjang HMI, Bubarkan HMI anak Masjumi, pembantu DI/TII!".⁵⁶ Dalam pandangan Lasswell, demonstrasi ini adalah bentuk reaksi otomatis dari masyarakat yang telah dipengaruhi oleh sirkulasi ide yang berulang-ulang. Massa tersebut telah menjadi satu kesatuan yang memiliki kehendak dan tujuan yang seragam, yaitu menuntut pembubaran HMI.

Penggunaan kekerasan (paksaan) di abad modern saat ini sudah banyak digantikan dengan kata kata atau bujukan (*seduction*) untuk mendapatkan dukungan dari penguasa. Hal ini terbukti pada pidato Wakil Perdana Mentri 1, Dr. Soebandrio didepan para demonstiran yang menuntut pembubaran HMI. Dukungan dari WPM Soebandrio ini memberikan legitimasi politik yang sangat kuat bagi gerakan pembubaran HMI. Pemerintah bahkan membentuk Tim KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi) yang diberi tugas untuk menyelidiki dugaan "teror HMI" di Malang. Dengan kata lain, propaganda PKI berhasil membawa kasus HMI dari ranah opini publik ke ranah kebijakan negara, dan menjadikan pemerintah sebagai alat untuk melegitimasi tuduhan-tuduhan mereka⁵⁷.

Menurut Lasswell, propaganda bekerja melalui ide yang terus-menerus diberikan. Namun, ide ini dapat terputus secara tiba-tiba jika terjadi perubahan dalam struktur kekuasaan. Terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) menjadi pemutus ide-ide yang telah di bangun PKI untuk membubarkan HMI. Sikap pemerintah pun berbalik drastis pacsu peristiwa G30S/PKI, setelah, Menteri PTIP Brigjen Dr. Sjarif Tajeb secara tegas menyatakan bahwa HMI tidak akan dibubarkan. Bahkan, pada 18 September 1965, KOTRAR mengeluarkan keputusan resmi bahwa mereka akan "membersihkan dan membina HMI", bukan membubarkannya. Kemudian, Menko Hubra Dr. Ruslan Abdulgani mengatakan "akan membantu proses kristalisasi, karena presiden sendiri mempunyai "kader kader yang dipercaya didalam tubuh HMI" demikianlah menko Ruslan menerangkan.⁵⁸ Keputusan ini menandai akhir dari ancaman pembubaran yang telah menghantui HMI selama lebih dari setahun. Propaganda PKI yang sedemikian dahsyat, melalui manajemen simbol dan standarisasi pikiran, pada akhirnya gagal total karena fondasi kekuasaan yang menjadi tumpuannya runtuh akibat peristiwa sejarah yang tak terduga.

Lasswell mengasumsikan bahwa publik adalah objek pasif yang akan merespons secara otomatis terhadap rangsangan simbol tertentu. Namun, penelitian komunikasi modern, seperti teori "*Two-Step Flow of Communication*" dari Lazarsfeld dan Katz, menunjukkan bahwa ide tidak langsung masuk ke dalam benak

⁵⁶ HR, "WPM Subandro Didepan 10.000 Demonstiran: Kalau HMI Dibubarkan... Karna Salah HMI Sendiri."

⁵⁷ HR, "WPM Subandro Didepan 10.000 Demonstiran: Kalau HMI Dibubarkan... Karna Salah HMI Sendiri."

⁵⁸ *Berita Yudha*, "Presiden Punja Kader Kader Terpertjaja."

masyarakat.⁵⁹ Dalam konteks penelitian ini, masyarakat masih memiliki ingatan kolektif kuat tentang pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Lalu, dalam teori Lasswell propaganda haruslah didukung penuh oleh infrastruktur penguasa. Tetapi, bahkan sebelum G30S/PKI keputusan KOTRAR pada 18 September 1965 yang memilih untuk membina HMI, bukan membubarkannya, telah mencabut legitimasi negara dari tuntutan PKI.

Propaganda tersebut gagal karena telah bersinggungan langsung dengan memori kolektif perjuangan bangsa (pemberontakan PKI di Madiun 1948) yang tidak bisa dihapus oleh kata-kata. Kemudian, ketika kudeta gagal dan keputusan KOTRAR telah mengarahkan kebijakan negara pada pembinaan, bukan pembubaran. Pada akhirnya, propaganda tanpa ditopang oleh dukungan kekuasaan yang kokoh dan kesesuaian dengan fakta sejarah, akan menemui kegagalan ketika realitas itu sendiri bangkit melawan propaganda tersebut.

KESIMPULAN

Artikel ini mengungkap bahwa konflik antara HMI dan PKI pada 1965 bukan semata pergulatan politik antarorganisasi, melainkan representasi dari benturan dua paradigma besar yang memperebutkan hegemoni wacana di ruang publik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Di satu sisi, PKI menggerakkan mesin propaganda yang sistematis untuk mengonstruksi realitas sosial melalui manajemen simbol, standarisasi opini, dan mobilisasi massa terencana sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Harold Lasswell. Di sisi lain, HMI mempertahankan eksistensinya bukan melalui kekuatan fisik atau jaringan elite semata, melainkan melalui konsistensi identitas kelembagaan yang berakar pada prinsip independensi dan nilai-nilai Islam-keindonesiaan.

Temuan utama penelitian ini menegaskan tiga proposisi konseptual. Pertama, propaganda politik tidak semata-merta berhasil karena kekuatan narasi, melainkan sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur kekuasaan yang mendukungnya. Keberhasilan awal PKI dalam membentuk opini publik tentang HMI sebagai "musuh revolusi" ternyata bersifat rapuh dan bersandar pada kondisi politik yang sewaktu-waktu dapat runtuh. Kedua, kegagalan propaganda PKI menunjukkan bahwa memori kolektif dan kesadaran historis masyarakat berfungsi sebagai tameng epistemologis yang membatasi efektivitas manipulasi simbolik. Pengalaman pemberontakan Madiun 1948 menjadi rujukan kolektif yang tidak dapat sepenuhnya dihapus oleh retorika politik apa pun. Ketiga, institusi yang memiliki kejelasan identitas dan konsistensi ideologis seperti independensi HMI memiliki kapasitas ketahanan (institutional resilience) yang melampaui tekanan eksternal, selama ia mampu

⁵⁹ P. F. Lazarsfeld, B. Berelson, and H. Gaudet, *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* (Columbia University Press, 1948), <https://books.google.co.id/books?id=S-lnIFR02FIC>.

mempertahankan koherensi internal dan membangun aliansi strategis di tengah perubahan konstelasi politik.

Dengan demikian, artikel ini menawarkan koreksi terhadap pendekatan historiografi yang selama ini cenderung membaca konflik HMI-PKI sebagai narasi heroik perlawanan atau sekadar manuver elite. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan ajang pertarungan wacana di mana media massa berperan sebagai medan produksi makna dan legitimasi. Keberhasilan HMI bertahan bukan karena propaganda politiknya semata, tetapi karena narasi yang dibangun PKI pada akhirnya terbukti tidak memiliki daya tahan ketika realitas historis yang dalam hal ini adalah peristiwa G30S menghadirkan pembuktian empiris yang bertolak belakang dengan konstruksi propaganda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayyubi, Shalahuddin, M. Hasbi Nabil, Ahmad Maftuh Sujana, and others. "Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) Pada Pasca Peristiwa Gestapu 1966." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 417-40.
- Asep Achmad Hidayat, Usman Supendi, and Dandie Hambaliana. "Sejarah Gerakan Sosial, Politik dan Agama di Kota Tasikmalaya pada Tahun 1901-1940." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 6, no. 1 (Agustus 2025).
- Bahri, Samsul. *Bulan Bintang Hijau Hitam: Sejarah HMI Di Kota Medan (1952-1998)*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025.
- Becker, Howard Saul. *Outsiders*. New York: Free Press, 1997.
- Berita Yudha (Jakarta). "Presiden Punja Kader Kader Terpertjaja." Oktober 1965.
- Faizal Arifin. *Metode Sejarah: Merencanakan Dan Menulis Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2023.
- Ferdiawan, Wiwid and others. "Tinjauan Historis Upaya Lobby Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepada Presiden Soekarno Tentang Pembubaran PKI Pada Tahun 1965." PhD Thesis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2015.
- Harian Rakjat* (Jakarta). "28 Ormas Tuntut HMI Dibubarkan." September 29, 1965.
- (Jakarta). "Dalam Aksi Aksi Membubarkan HMI WPM Subandrio Hargai Militansi Mahasiswa." March 24, 1965.
- (Jakarta). "Editorial: Teror HMI." March 9, 1965.
- (Jakarta). "Gerombolan HMI Meneror." March 9, 1965.
- (Jakarta). "HMI Setan Perguruan." Oktober 1965.
- (Jakarta). "HMI Sudah Terang Terangan Bertindak Kontra-Revolusioner." March 15, 1965.
- (Jakarta). "Teror HMI Tak Dapat Ditolerir 12 Organisasi Pemuda Dan Mahasiswa Menuntut HMI Dibubarkan, Teroris-Terorisnya Ditangkap Dan Dihukum." March 10, 1965.

- Harian Suluh Indonesia* (Jakarta). "Harusnya Tidak Ada Plinat-Plinut Terhadap HMI." March 12, 1965.
- Harold Lasswell. *Propaganda Technique In the World War*. New York: Ravenio Books, 1938.
- Hill, David T. *Pers Di Masa Orde Baru*. The Press In New Order Indonesia, 2011. 1st ed. Jakarta: Yayasan ustaka Obor, 2011.
- HR. "WPM Subandro Didepan 10.000 Demonstran: Kalau HMI Dibubarkan... Karna Salah HMI Sendiri." *Harian Rakjat* (Jakarta), March 15, 1965.
- (Jakarta). *12 Organisasi Pemuda Dan Pelajardukung PWI*. March 10, 1965.
- Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta). "HMI Setan Kota." Mei 1965.
- "Keputusan Presiden (Keppres) No. 200 Tahun 1960." Keputusan Presiden (Keppres). Pemerintah Pusat, Agustus 1960.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/150794/keppres-no-200-tahun-1960>.
- Kompas. "KOTRAR Bereskan dan Bina HMI." *Kompas* (Jakarta), September 18, 1965.
- . "Masalah HMI." *Kompas* (Jakarta), September 20, 1965.
- . "Soal HMI Segera Diumumkan oleh KOTRAR." *Kompas* (Jakarta), September 6, 1965.
- . "Tidak Hanya HMI." *Kompas* (Jakarta), September 16, 1965.
- (Jakarta). "KOTRAR Bereskan Dan Bina HMI." September 15, 1965.
- Lazarsfeld, P. F., B. Berelson, and H. Gaudet. *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. Columbia University Press, 1948. <https://books.google.co.id/books?id=S-lnIFR02FIC>.
- Luthfah Eta, Aini, and SitiMaimunah. "Islam Bergerak dan Pertarungan Gagasan: Analisi Redaksi Sebagai Respon Gerakan Misionaris dan Zending di Surakarta, 1917-1923 M." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i01.255>.
- Madjid, M. Dien. *Metode Sejarah: Teori Dan Praktek*. Kencana, 2021.
- PB HMI. "Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2026." Pontianak: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2026, 24 November - 11 Desember2023.
- Rasyidi, M. *Islam Menentang Komunisme*. Djakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1965.
- Sitompul, Agussalim. *Menyatu Dengan Umat, Menyatu Dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman Keindonesiaan HMI, 1947-1997*. Jakarta: Kerjasama PT. Logos Wacana Ilmu dengan Lembaga Indonesia Adidaya, 2002.
- . *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*. Jakarta: CV Misaka Galiza, 1976.
- Soekarno. *Pidato Soekarno Pada Amanat PJM Presiden Sukarno Pada Rapat CGMI Di Istora, Senajan*. Djakarta: ANRI, 1965.
- Thomas, R. M. *A Chronicle of Indonesian Higher Education: The First Half Century, 1920-1970*. Chopmen, 1973.